

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan GBHN yang menggariskan bahwa pembangunan dibidang ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi. Oleh karena itu perekonomian Indonesia harus disusun bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Badan usaha yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud adalah koperasi. Dalam rangka ikut serta dalam pembangunan nasional, koperasi diharapkan dapat menjadi sokoguru perekonomian negara yang artinya ekonomi rakyat dibawah mendukung perekonomian besar diatasnya.

Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil. Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (*engine*) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (*socialwelfare*), sekaligus menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih pemeratakan kesejahteraan

selaras dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Koperasi sebagai sebuah alternatif yang paling mungkin dalam melawan dan menghadapi pasar bebas yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pengembangan usaha koperasi adalah sangat strategis, mengingat banyak macam dan ragam komoditas pertanian yang penanganannya bukan dilakukan oleh perusahaan raksasa melainkan oleh koperasi. Contohnya adalah industri bunga di Almeer, Negeri Belanda. Agribisnis bunga ini telah menguasai perdagangan bunga diseluruh dunia dengan segala kelengkapannya. Penguasa agribisnis bukan perusahaan raksasa melainkan para petani bunga yang bergabung menjadi kelompok-kelompok koperasi¹.

Koperasi mempunyai tujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya namun dalam mencapai tujuan ini koperasi terbentur oleh berbagai masalah yang membelenggu baik dari faktor internal maupun eksternal. Perkembangan koperasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, pertumbuhannya dapat digambarkan sebagai berikut:

¹ Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Azas Kekeluargaan "Koperasi Menjawab Tantangannya"* (Jakarta : UNJ-Press, 2004) hal.117

Tabel 1.1.
Tingkat Pertumbuhan Koperasi

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Koperasi	Persentase
2000-2001	103.077 - 110.766 unit	7,46%
2001-2002	110.766 - 117.906 unit	6,45%
2002-2003	117.906 - 123.181 unit	4,47%
2003-2004	123.181 - 130.730 unit	6,13%
2004-2005	130.730 - 134.963 unit	3,24%
2005-2006	134.963 - 141.326 unit	4,71%
2006-2007	141.326 - 144.527 unit	2,26%
2007-2008	144.527 - 155.301 unit	7,45%

Sumber Data : Syahjoni R, Tantangan Membangun Jatidiri Koperasi. <http://koranbandung.com> (Diakses Tanggal 12 Juli 2009)

Berdasarkan tabel diatas secara rata-rata pertumbuhan perkembangan koperasi di Indonesia tidak lebih 6,5% per tahun. Fakta berikut adalah pertumbuhan koperasi diikuti dengan koperasi yang sudah tidak aktif, data koperasi tidak aktif per tahun dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Koperasi Yang Tidak Aktif

Tahun	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Persentase
2000	14.147 unit	13,72%
2001	21.010 unit	18,97%
2002	24.857 unit	21,08%
2003	29.381 unit	23,85%,
2004	37.328 unit	28,55%
2005	40.145 unit	29,99%
2006	42.382 unit	30,48%
2007	44.048 unit	43,83 %
2008	46.335 unit	29,84%

Sumber Data : Syahjoni R, Tantangan Membangun Jatidiri Koperasi. <http://koranbandung.com> (Diakses Tanggal 12 Juli 2009)

Berdasarkan tabel diatas secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%. Jika dilihat, tentu dapat menyadarkan kita sebagai insan koperasi yang merindukan

agar koperasi dapat tumbuh menjadi badan usaha yang mampu masuk kedalam jaring perekonomian nasional.

Keberadaan koperasi di tengah masyarakat sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka diperlukan suatu tindakan usaha agar kegiatan ekonomi secara terus menerus dan menguntungkan bagi koperasi dan dapat dengan segera mensejahterakan anggotanya. Sama halnya dengan badan usaha lain, koperasi juga melaksanakan aktivitas usahanya dengan memperlihatkan dan menerapkan prinsip rasional ekonomis dan efisiensi. Selain mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah ada, koperasi dapat mengembangkan usaha baru yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Pengembangan usaha koperasi harus dilakukan secara menyeluruh dari merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan hingga mengawasi kegiatan usaha koperasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tetap mempertimbangkan sisa hasil usaha yang wajar. Hal ini merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi koperasi untuk memperbesar skala usahanya. Dalam mengembangkan usaha koperasi diperlukan segala macam faktor seperti citra koperasi dikalangan masyarakat, jumlah modal koperasi, partisipasi anggota, kerjasama dengan badan usaha lain, akses pemasaran, kemampuan manajerial pengurus.

Citra koperasi semenjak reformasi bergulir dihantam berbagai pernyataan tidak baik, bahwa badan usaha koperasi dianggap buruk, pengurusnya

cari untung sendiri, tak mampu mandiri, dan hanya bisa maju karena dibiayai oleh pemerintah. Kondisi itu juga diakui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa akibat salah urus di masa lalu, citra koperasi hancur. Padahal program pembangunan koperasi adalah program yang sangat bagus, tetapi karena pengelolaannya buruk akhirnya koperasi divonis buruk juga².

Jumlah modal koperasi merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pengembangan usaha koperasi. Berkenaan dengan itu, Pemerintah memberikan bantuan dana pinjaman bulan Mei tahun 2009 adalah sebesar Rp 64.9 miliar kepada 2.581 unit usaha kecil dan sebesar Rp 11,3 miliar kepada 297 unit usaha koperasi³. Dengan pemberian kredit pada koperasi ini akan meningkatkan permodalan koperasi dalam membiayai usaha koperasi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha koperasi adalah partisipasi anggota yang aktif. Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi, karena berapapun besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gencarnya kampanye gerakan koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, Badan Pengawas dan Manager tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya. Kedudukan anggota dalam koperasi sangat penting karena anggota sebagai pemilik (*owners*) dan juga merupakan pelanggan (*users*) bagi koperasi yang menentukan maju dan mundurnya koperasi. Koperasi merupakan

² Suryadharma Ali. *Koperasi Semakin Terdegradasi* <http://www.suarapembaruan.com>. Diakses tanggal 7 Juli 2008).

³Administrator, *CSR Award Koperasi 2009 Diraih 6 Perusahaan, Sebagai Perusahaan Terbaik Pembina Koperasi Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke-62, 2009*, hal.2 (<http://www.depkop.go.id/Juli.htm>).

kumpulan orang-orang dan bukan merupakan kumpulan modal yang menitik beratkan pada partisipasi anggotanya. Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi pengambilan keputusan karena partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam sebuah koperasi. Dengan demikian partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia, karena pada kenyataannya untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggota koperasi. Masalah yang timbul pada pertumbuhan koperasi di negara kita yaitu pertumbuhan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang tidak aktif. Salah satu kendalanya disebabkan oleh karena masih banyak anggota yang kurang berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berkoperasi, padahal partisipasi anggota dalam koperasi sangat penting peranannya untuk memajukan dan mengembangkan koperasi.

Kemitraan antara koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga merupakan faktor yang dapat menentukan pengembangan usaha koperasi. Alasan mengapa hal ini harus ditingkatkan kualitasnya adalah karena manfaat dari jalinan kemitraan antara koperasi dan UMKM amat terasa. Dari kerjasama, Koperasi dan UMKM dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga lebih mengembangkan usaha yang dijalankannya. Mekanisme kerja sama yang dilakukan itu berdasarkan kepentingan bersama, sehingga terjadi

simbiosis mutualisme di antara keduanya. Selain sebagai cara untuk mengikis citra buruk yang saat ini melekat pada koperasi di seluruh Indonesia.

Akses pemasaran koperasi masih minim, ruang pasar yang dimasuki oleh produk-produk koperasi pada umumnya adalah pasar lokal dan sangat sedikit yang mampu menembus pasar global. Minimnya akses pemasaran, promosi dan mutu membuat koperasi tidak mampu mengembangkan usahanya. Penguasaan teknologi perlu dikembangkan bagi para pelaku penggerak koperasi terutama yang berkaitan dengan akses pemasaran seperti internet. Hal ini akan memudahkan koperasi untuk membangun jaringan, mengakses pasar, dan memperoleh informasi terkini, serta akan mampu merangsang inovasi.

Faktor lain yang dapat menunjang pengembangan usaha koperasi adalah kemampuan manajerial pengurus. Pengurus secara normatif dalam organisasi koperasi memiliki fungsi yang amat strategis yaitu bertindak sebagai pengusaha yang menjaga kesinambungan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang efisien. Rendahnya kualitas dari pengurus koperasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya kemampuan manajerial pengurus dalam mengelola koperasi. Hal ini yang mengakibatkan proses manajemen koperasi lemah sehingga arah dan tujuan yang hendak dicapai koperasi tidak bisa diraih terutama dalam pengembangan usaha koperasi.

Unit usaha koperasi pada saat ini, tidak hanya bergerak dalam satu usaha saja namun sudah mampu bergerak di berbagai bidang usaha. Koperasi yang demikian lebih dikenal dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU). Namun sayangnya, pengembangan usaha koperasi serba usaha di Jakarta Utara tidak

terlalu baik. Jumlah koperasi di Jakarta Utara yang terdaftar berjumlah 77 koperasi dan yang aktif menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 53 koperasi⁴. Jumlah koperasi yang tidak aktif di Jakarta Utara berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam kelembagaan, terutama mengenai alat perlengkapan organisasi dan kemampuan manajerial para pengurus koperasi. Hal ini dapat terlihat di beberapa koperasi di Jakarta Utara yang para pengurusnya mengelola semua unit usaha koperasi tanpa adanya pembagian tugas yang jelas. Selain itu, koperasi sulit berkembang karena kurangnya kerja sama antara anggota dan pengurus, serta kurangnya partisipasi anggota akibat pengurus tidak mampu menggerakkan anggota dan mengikutsertakan anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Masalah tersebut dapat disebabkan karena terbatasnya kemampuan pengurus mengenai pemahaman manajemen secara konseptual dan teknis dalam mengelola koperasi. Berdasarkan pembahasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti guna menelaah mengenai “Hubungan antara Kemampuan Manajerial Pengurus dengan Pengembangan Usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah–masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara citra koperasi dikalangan masyarakat dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?

⁴ *Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara*.2009.

2. Apakah terdapat hubungan antara jumlah modal koperasi dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?
3. Apakah terdapat hubungan antara kerja sama dengan badan usaha lain dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?
4. Apakah terdapat hubungan antara akses pemasaran dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?
5. Apakah terdapat hubungan antara daya saing koperasi dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?
6. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan manajerial pengurus dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, ternyata masalah pengembangan usaha koperasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti, oleh karena keterbatasan pengetahuan peneliti maka peneliti membatasi hanya pada masalah hubungan antara kemampuan manajerial pengurus dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan ialah "Apakah terdapat hubungan antara kemampuan

manajerial pengurus dengan pengembangan usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Jakarta Utara?.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu yang berkepentingan khususnya tentang kemampuan manajerial pengurus dan pengembangan usaha koperasi. Sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi semua pihak.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kemampuan manajerial pengurus dan pengembangan usaha koperasi. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.